
INDONESIA NET ZERO SUMMIT 2023

It's Now or Never!

Saturday, 24 June 2023

Djakarta Theater XXI, Jakarta

Sesi B3

“Menempatkan Isu Iklim di Hati Pemda Indonesia”

Video Message

Bambang Susantono, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN)

Pertanyaan: IKN mengusung konsep *forest city*, di mana pembangunan hanya dilakukan pada 25% wilayahnya, dan menjadikan 75% ruang hijau. Tapi, bagaimana dengan model pengelolaan lingkungan lainnya? (seperti pengelolaan sampah dengan meningkatnya aktivitas, penyediaan energi, dan pemenuhan komitmen penurunan emisi).

Pembangunan IKN akan dilakukan sesuai dengan prinsip emisi karbon yang rendah, termasuk penggunaannya, misalnya dengan energi baru dan terbarukan. Kami akan mulai menggunakan sumber daya dari energi surya yang pada tahap-tahap selanjutnya akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat di bidang ini. Pada saat transisi sebelum tahun 2030, kami akan memanfaatkan gas, khususnya untuk memastikan stabilitas asupan energi ke berbagai objek vital di IKN. Di fase-fase selanjutnya, kami juga akan menggunakan sumber-sumber lain, termasuk dari angin, yang saat ini memang sedang dikaji dan dikembangkan.

Untuk persampahan, target IKN pada tahun 2045 setidaknya 60% timbunan sampah akan didaur ulang. Kebijakan kami saat ini adalah mengelolah sampah sebisa mungkin dari sumbernya. Saat ini, kampanye gerakan gaya hidup minim sampah sudah kami mulai. Selain itu, pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu juga sedang kami lakukan. Kebijakan persampahan juga telah kami susun, mulai dari sampah konstruksi, sampah rumah tangga, dan sebagainya.

Selain itu, sebagai kota cerdas, tentunya pengelolaan sampah di IKN akan mengikuti yang apa disebut *smart waste management*, dengan menggunakan berbagai teknologi cerdas yang juga sedang kami persiapkan.

Pertanyaan: Informasi yang kami dapatkan, kawasan IKN bukanlah lahan kosong, karena sudah ada masyarakat yang telah tinggal di sana. Bagaimana Otorita IKN dapat memastikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup di IKN juga tetap memperhatikan hak-hak masyarakat tersebut?

Situasi dan kondisi IKN saat ini memang bukanlah tanah kosong. Selain karena sebagian besar merupakan hutan produksi, terdapat pula pemukiman masyarakat lokal. Saudara-saudara kita yang berada di sana seiring berjalannya waktu telah merefleksikan kebhinekaan di Nusantara. Dapat saya tegaskan

bahwa peran masyarakat lokal sangatlah penting di IKN dalam mengelola hutan karena prinsip dasar pengelolaan hutan di IKN adalah *community-based forest management*.

Rancangan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN sendiri dilakukan sesuai dengan tipologi area rehabilitasi yang dibedakan antara lahan yang *clear* dan lahan yang berpohon. Untuk yang berpohon, rehabilitasi hutan dilakukan secara partisipatif yang pada prinsipnya akan memperhatikan keberlanjutan atau *livelihood* kehidupan masyarakat. Misalnya, melalui *agroforestry*, seperti di lahan yang saat ini sudah terlanjur dijadikan perkebunan sawit. Selain itu masyarakat setempat juga akan diajak untuk berperan aktif dalam menjaga hutan tersebut, misalnya antara lain sebagai penjaga hutan, pemadam kebakaran hutan, dan sebagainya.

Khusus untuk masyarakat asli, kami membuat kebijakan berbasis kearifan lokal. Sehingga pengetahuan yang telah ditumbuhkan oleh masyarakat tersebut selama berpuluh-puluh tahun akan diakui, dilindungi, dan dikembangkan sebagai *best practices*. Sebagai tambahan, saya dapat pastikan, bahwa aspek-aspek sosial di IKN akan terjaga dengan baik karena IKN akan mengikuti standar *ESG (Environment Social and Governance)* sebagai standar yang diakui secara global.

IKN akan menjadi kota pertama di Indonesia yang akan memiliki dan menerapkan standar tersebut; kami akan membentuk komite *ESG* di tingkat kota, dan salah satu langkah yang akan diterapkan adalah menyusun *Environmental and Social Safe Card Policy* yang akan menjadi salah satu panduan kami. Kami berkeyakinan bahwa pemenuhan standar *ESG* ini sangat penting. Tidak hanya dalam pembangunan ke depan, tetapi juga untuk memastikan bahwa keberadaan IKN memberikan dampak positif pada lingkungan dan masyarakat.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Itu adalah gambaran tentang IKN dan itu akan membuka diskusi kita karena dibahas soal sampah. Bicara soal sampah, saya dengar berita yang cukup ramai dibicarakan yakni Bogor mempunyai tantangan soal sampah. Teman saya dari FWI (Forest Watch Indonesia) sering mengunjungi Sungai Ciliwung dan membersihkan sampah setiap pagi. Menurut mereka dramatis, tetapi sekarang sudah terlihat mulai ada perbaikan dan ada kemajuan. Apakah Pak Bima bisa ceritakan? Bagaimana perjuangan dalam menghadapi sampah yang begitu menumpuk lalu berkurang, Pak?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Terima kasih. Saat ini masalah yang paling *complicated* selain kemiskinan dan pengangguran di Indonesia adalah sampah. Kita sekarang menjadi 1 dari 20 negara ekonomi terbesar di dunia; pada tahun 2045 kita diprediksi akan menjadi 5 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Akan tetapi angka-angka itu sepertinya tidak *match* kalau kita jalan-jalan ke pasar atau sungai dan melihat sampah menumpuk. Masalah itu *complicated*. Kenapa? Satu, karena itu merupakan masalah sistemik. Kita tidak bisa mengurus sampah di ujung saja, tetapi harus dari awal, yakni dari rumah tangga.

Kedua, sampah merupakan masalah kultur atau kebiasaan. Contohnya, saya pernah berbincang dengan Duta Besar kita di Korea. Warga Indonesia yang berada di Korea menjadi sangat disiplin dan enggan membuang sampah sembarangan karena tidak bisa menemukan tempat sampah. Di Seoul atau Tokyo pun sama, warga Indonesia yang pergi belanja biasanya mengalami kesulitan untuk menyimpan kantong

plastik atau kotak belanja dikarenakan tidak ada tempat sampah. Hal itu disebabkan bukan karena pemerintah di negara-negara tersebut tidak mampu untuk membuat tempat sampah, tetapi karena sistemnya memang sudah selesai di rumah tangga, jadi tidak ada lagi sampah. Warga di negara-negara tersebut sangat tertib, orang Indonesia pun terbawa tertib, bersih, serta terbiasa mengelolah sampah di apartemen atau rumahnya. Namun menurut Duta Besar — ketika lebaran di Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan di Seoul — setelah warga Indonesia menunaikan ibadah Sholat Eid, banyak sampah yang menumpuk sangat hingga ditegur oleh RT setempat. Ternyata jika kita dibawa ke sistem yang bagus, maka akan terbawa jadi bagus. Pun sama halnya dengan hidup di negara maju, maka akan terbawa maju pemikirannya. Itu yang saya maksud rumit. Tidak hanya masalah sistem dan infrastruktur, namun juga kultur dan *behaviour* seperti itu. Itu kenapa kepala daerah seperti Gubernur, Wali kota, dan Bupati tidak mudah untuk mengurus hal ini, banyak yang kemudian *give up*. Lebih baik mengurus sesuatu yang *clear*, jelas manfaatnya, dan jelas hasilnya. Urusan sampah tidak mudah, itu *challenge* utama. Jadi intinya, aktor, infrastruktur, dan kultur di Indonesia rumit. Apabila ingin membenahi sampah, maka ketiga aspek itu harus diperhatikan.

Bagian kedua, sebagian besar 70% sampah di Indonesia memang dibuang ke tempat pembuangan akhir, 15% tidak diangkut, 15% lagi didaur ulang, yang 17% di ujung juga menumpuk. Itu semakin lama semakin menjadi persoalan. Bahkan di banyak kota di Indonesia, banyak warga memprotes tempat pembuangan akhir. Selain itu menjadi tempat bagi LSM untuk memeras petugas, kemudian kontraknya berakhir, dan tidak tahu bagaimana mengolahnya. Lalu banyak yang bertanya, kenapa tidak menggunakan teknologi? Pertanyaannya adalah teknologi apa? Sebagai Wali Kota, sudah hampir puluhan hingga ratusan kali saya menerima audiensi yang menawarkan berbagai inovasi teknologi mulai dari insinerator dan lain-lain. Tapi sebagian besar merupakan *profit-oriented* dan *making money* dan kita tidak tahu apakah itu ramah lingkungan atau tidak. Dari pemerintah pusat pun belum ada *guidance* yang jelas, jadi kemudian pemerintah harus mencari jalan sendiri.

Tapi *good news*-nya, saat ini sangat beda dengan zaman saya ketika muda. Dulu aktivis yang orasi di panggung-panggung dan aktif *traveling* merupakan aktivis pro demokrasi. Mereka banyak bicara tentang *human rights*, *civil society*, hingga *state*. Hari ini tidak, saya sangat senang melihat anak-anak muda bicara tentang *climate change*, *waste management*, dan *circular economy*. Anak-anak muda yang terinspirasi dengan Greta Thunberg, mempunyai nyali yang luar biasa dalam membungkam para pemimpin dunia dalam konferensi iklim dunia. Tiga minggu lalu saya diundang ke Paris karena Bogor dianggap cukup maju dalam mengatasi masalah plastik. Saya *surprised* melihat anak-anak muda dari Afrika, *Europe*, Amerika, dan Asia, bicara di panggung dengan fasih dan menggebu-gebu tentang bahaya polusi sampah plastik.

Sekarang anak-anak muda banyak memproduksi video yang keren, seperti video berjudul Pulau Plastik, dan Kota Bogor banyak berkolaborasi dengan anak-anak muda ini. Teman-teman silakan datang ke BTM di Bogor, kita berkolaborasi dengan salah satu *provider* dalam menciptakan mesin yang bisa merubah botol plastik bekas menjadi pulsa. Teman-teman bisa lihat di Galuga, tempat pembuangan sampah akhir kita. Kita bekerja sama dengan anak-anak muda, banyak dari mereka merupakan lulusan Australia dari *Plastic Plus*. Mereka membuat sampah-sampah plastik kita yang tidak bernilai — seperti mie instan dan *sachet* kopi-kopi — dikumpulkan oleh mereka, lalu diolah menjadi *paving block*. *Paving block* ini diproduksi lalu dipakai untuk taman-taman di Bogor. Kuat dan murah. Sekarang kita sedang bekerja sama

dengan salah satu perusahaan di Cilegon untuk mengirim plastik-plastik kita diolah menjadi aspal, dan beberapa kota sudah mulai.

Jadi *good news*-nya adalah *we are on the right track* sekarang, *bad news*-nya adalah banyak *challenge*-nya. Tapi, itu baru 15% yang terurai, maka dari itu kita harus bekerja keras mengolah sampah di TPA.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Artinya, walaupun sudah ditemukan teknologi untuk sampah plastik menjadi *paving block* dan lain-lain, bukan berarti kita harus menggunakan banyak plastik, ya, Pak?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Benar, kita memberlakukan kebijakan Botak (Bogor Tanpa Kantong Plastik). Jadi kita melarang warga Bogor belanja menggunakan kantong plastik di semua toko retail modern. Awalnya cukup rumit karena toko-toko retail protes dan para ibu mengalami kebingungan. Tetapi sekarang semua orang beralih memakai *totebag* yang lucu. Jadi fase tersebut sudah terlalui, dan sekarang kita mau merambah ke pasar tradisional. Kebijakan ini baru satu tahun berjalan karena substitusi di pasar tradisional sulit. Kita masih sosialisasi di situ.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Artinya memang sudah ada upaya untuk pengurangan untuk sampah yang sekarang terbang, setidaknya sudah ada solusinya untuk menjadi pulsa.

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Iya. Poin saya adalah ini semua terjadi ketika kita terbuka, *open to* gagasan. Kebanyakan dari yang tadi saya katakan berasal dari DM Instagram. Mereka mempunyai ide seperti ini, saya undang mereka ke balai kota untuk presentasi. Harus saya akui, *challenge* di banyak daerah seperti itu. Terkadang kalau kita jalan-jalan ke kota lain dan ketemu komunitas, banyak yang meminta untuk dikenalkan dengan Bupati atau Wali Kota agar gagasan kita bisa diadopsi. Teman-teman bisa lihat, kepala daerah yang terbuka seperti Kang Emil, Azwar Anas, hingga Ibu Risma, banyak yang sudah mulai terbuka dan mulai *collab* dengan anak-anak muda. Jadi jangan tertutup karena APBD kita sedikit. Berdasarkan data, hanya 0.5% dari APBD kota yang dialokasikan untuk sampah. Itu tidak cukup, perlu lebih besar untuk mengolah sampah ratusan ton. Bogor sendiri sehari menghasilkan 600 ton sampah.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Kalau melihat diskusi tema kita siang hari ini, sebenarnya bagaimana melekatkan komitmen iklim ke dalam hati Pemda dalam perencanaan-perencanaan daerah? Apakah Bogor bisa dikatakan sudah melekat cintanya kepada komitmen iklim? Atau apakah ke depan masih ada tantangan yang perlu dihadapi?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Saya beruntung, karena didahului oleh pendahulu saya, yakni usaha-usaha dan program-program untuk menguatkan identitas Bogor sebagai kota hijau. Karena Bogor adalah *the first green city in eastern part of the world*. Kita mempunyai Kebun Raya di pusat kota — yang mana terdapat *spot-spot* hijau dan pohon-pohon tua — sedangkan Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok tidak. Selain itu, ada pohon

berusia ratusan tahun di Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pemuda. Makanya kota hijau berusaha kita pertahankan. Dulu kita meraih Jawara Adipura, *the cleanest city in the nation 8 times in a row*, secara berturut-turut sejak tahun 80-an. Kota hijau, tapi lama kelamaan hijaunya karena angkot, disertai dengan kemacetan dan sebagainya. *Effort* untuk menjaga kota hijau sangat kuat. Kita bekerja sama dengan ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives), UCLG (United Cities and Local Government Asia Pacific), serta dengan lembaga-lembaga donor untuk menjaga itu.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Tapi ini menarik, mengingat tadi mendengar Pak Bima sedih melihat Bogor kehilangan status *green city*. Apakah ada inspirasinya ketika Pak Bima ingin menjadi Wali Kota untuk mengambil status itu kembali?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Ada tiga hal yang membuat saya bermimpi menjadi Wali Kota saat itu. Satu, Bogor sering mengalami kemacetan, kedua, Bogor intoleran, dan ketiga Bogor dianggap kotor. Saya ingat ketika saya duduk di bangku SD, Piala Adipura diarak keliling Kota Bogor untuk dipertunjukkan kepada warga di tahun 80-an. Saya sangat terkesan saat itu. Lalu kami menyanyikan mars Kota Bogor sembari menyambut penghargaan tersebut. Namun, saat saya SMA, *ambience* tersebut hilang. Saya beritahu kepada lurah, camat, dan kepala dinas untuk menyambut saya saat *blusukan* dengan lagu itu ketika saya menjadi Wali Kota karena saya ingin anak-anak mulai sadar bahwa dulu kota kita ini adalah kota yang indah, sejuk, nyaman, bagai bunga di dalam taman. Jadi mulailah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Setelah 28 tahun dengan berbagai macam *effort* yang kita lakukan, akhirnya tahun ini Adipura kembali. Saya terinspirasi dari Ibu Risma untuk membuat lomba kebersihan mulai dari tingkat RT dan saya terinspirasi dari Mas Azwar Anas untuk membangun bank sampah. Tidak apa-apa menjiplak semuanya.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Saya dengar dari TV bahwa Pak Bima terinspirasi sejak SD untuk merebut Adipura saat menjadi Wali Kota, lalu Pak Bima menyerahkan ini ke anak muda untuk meneruskan tongkat estafetnya. Yang menarik dari pelajaran tadi adalah keterbukaan. Pak Bima menunjukkan bahwa Bogor ini milik bersama, jadi untuk membangunnya harus kolaborasi, apakah benar begitu?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Benar. Kita buat satgas Ciliwung, yaitu *task force* yang digaji dengan APBD. Tugasnya setiap hari edukasi tentang sampah, cari solusi tentang sampah, dan kemudian mengingatkan aturan-aturan tentang sampah setiap hari. Terdiri dari warga, lurah, dan lain-lain. Bahkan saya penasaran, apa masalah dari sampah ini? Saya naik perahu karet mulai dari Kota Bogor ke Depok, menginap semalam di Depok. Dari Depok membutuhkan waktu hingga 12 jam untuk tiba di Pintu Air Manggarai, disitu terlihat sepanjang jalan Ciliwung. Saat saya sedang naik perahu, tiba-tiba di depan saya ada *springbed* jatuh ke bawah, dilempar orang. Lalu ada pabrik tahu yang membuang limbah, ada pabrik sepatu, serta ada sampah yang sudah 10 tahun disitu dan sudah jadi gunung. Pertanyaan saya, kemana RT dan RW-nya? Kemana Bupati atau Wali Kota-nya? Jadi itu yang saya katakan rumit, karena harus dari ujung sampai ke bawah.

Bu Risma keren di Surabaya, dia membuat lomba kebersihan tingkat RT, jadi RT bergerak dari bawah. Kita jiplak, di sana kerja sama dengan media, maka di Bogor kita buat juga. RT-RT pun senang diekspos. Kita buat penjurian, masuk koran, foto-foto, jadi akhirnya sekian tahun mereka berkompetisi untuk bisa

menjadi RT terbaik di Kota Bogor. Kita kirim juga mereka ke Hiroshima, Jepang untuk belajar mengolah sampah, dan studi banding. Gubernur Hiroshima juga pernah mengunjungi Bogor, dia berkata Bogor sepertinya mempunyai potensi, makanya kita kirim.

Q&A SESSION

Dwi Indriani, Kementerian Dalam Negeri RI:

Sepengetahuan saya, selain menjabat sebagai Wali Kota Bogor, Pak Bima juga menjabat sebagai Ketua APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia). Apakah tidak ada program atau acara-acara untuk *influence* pemerintah daerah — khususnya Wali Kota seluruh Indonesia — untuk dapat memprioritaskan program-program yang peduli terhadap iklim? Terutama di Kota Bogor, seperti pengolahan sampah yang lebih baik. Karena kemarin saya melihat seminar dalam HUT APEKSI di Palembang namun masih bertema investasi.

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Sepertinya kemarin kurang *intense* saat di Palembang. Pernah suatu hari kita membahas khusus tentang sampah, kita undang seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup se-Indonesia di Palembang. Jadi kita *brainstorming*, kita mengingatkan kepada para LH bahwa kita mempunyai target *zero emission*, dan ada hal-hal yang seharusnya bisa dipercepat. Tidak semua kepala dinas *concern* akan hal ini, maka dari itu dorongannya harus banyak, baik itu melalui kepala dinas maupun komunitas.

APEKSI ada di 98 kota di Indonesia, merepresentasikan 80 juta penduduk. Sejak saya menjadi Ketua APEKSI, kita membuat YCC (Youth City Changer). Kita mengumpulkan komunitas-komunitas pemuda se-Indonesia untuk bicara bagaimana berkolaborasi dengan kota. Ketika saya pergi ke Samarinda atau Bukit Tinggi, pertanyaannya, kenapa di kota ini enak-enak? Wali Kota-nya terhubung dengan komunitas-komunitas, tetapi kita tidak. Bagaimana caranya? Maka dari itu, kita kumpulkan, seperti *matchmaker* agar anak-anak muda komunitas ini terhubung dengan kotanya. Mereka juga kebanyakan mengusung isu ini, jadi kita mendekatkan isu iklim ini dengan berbagai macam cara. Tidak hanya melalui jalur birokrat formal, tetapi juga melalui jalur anak-anak muda.

Kalau kita perhatikan, partai politik juga tidak terlalu *concern* dengan isu-isu sampah, iklim, dan lain-lain, karena mungkin tidak mempunyai insentif elektoralnya dan tidak semua paham akan hal itu. Ini menjadi masalah. Padahal berdasarkan survey, Gen-X, Gen-Y, Gen-Z, dan Millennial jauh lebih *concern* terhadap *climate change* dibanding generasi saya dulu. Jadi sebenarnya kita dapat menggarap anak-anak muda harus dengan cara ini, tetapi seringkali *effort*-nya kurang. Saya berusaha di partai saya, di partai-partai yang lain pun kita dorong tentang isu ini, dan beberapa kegiatan partai pun kita dorong untuk mengolah sampah. Kita bisa dorong di setiap kota untuk mengolah sampah secara mandiri dalam setiap *event*. Semua sampah dikumpulkan, didistribusikan ke jaringan, lalu diolah.

Farhan, publik:

Sejauh mana Bogor sudah menerapkan kebijakan-kebijakan — selain terkait persampahan — namun juga mengenai penanganan krisis iklim? Di Bogor, masalah yang paling mudah kita temui ada macet dan *overload* kendaraan. Apakah ada kebijakan seperti Perda atau Peraturan Wali Kota yang bisa dicontoh

untuk kabupaten-kabupaten lain atau kota-kota lain — yang mungkin mirip karakternya dengan Bogor — yang juga mempunyai permasalahan sampah dan kemacetan?

Saya ingin Pak Bima mengingatkan lagi untuk teman-teman yang mungkin lupa, Adipura itu KPI-nya apa saja, lalu seberapa jauh dia berperan dalam penanganan krisis iklim di tingkat perkotaan?

Jenly Immanuel, Ruang Internasional:

Sejauh mana sebenarnya konsep *smart city*? Salah satu indikator dari *smart city* ada 6, terutama *smart city environment*, yang diterapkan ke sebuah komitmen dari pemerintah-pemerintah daerah, seperti Pemerintah Kota Bogor dalam mengatasi krisis iklim. Saya tahu Pemerintah Kota Bogor mengganti minyak jelantah sebagai pengganti bahan bakar — khususnya untuk bus kita, termasuk Trans Pakuan yang merupakan transportasi publik saat ini di Kota Bogor — untuk menekan rendah emisi karbon. Saya juga dengar pemerintahan Kota Bogor sedang melakukan pengalihan angkutan umum, seperti angkot ke daerah pinggiran kota dengan memaksimalkan transportasi publik yaitu bus kita.

Juniarti Elisabeth, ICLEI:

Bogor menjadi salah satu kota yang berkomitmen untuk aksi iklim. Saya ingin bertanya kepada Pak Bima sebagai pemimpin kota, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan seorang pemimpin untuk akhirnya berkomitmen untuk menghadapi krisis iklim? Apa kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk kota-kota yang ingin berkomitmen menurut pandangan Pak Bima?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Kalau bicara program tentang *climate change*, mengurangi emisi, dan lain-lain rentangnya cukup banyak. Pedestrianisasi di Bogor adalah bagian dari itu, jadi banyak orang-orang yang mengkritik itu, “Kenapa di Bogor banyak pembangunan trotoar? Kenapa bukan jalan yang dilebarkan?”. Targetnya adalah membuat orang-orang terbiasa jalan kaki, karena membiasakan orang Indonesia untuk berjalan adalah hal yang paling sulit. Menurut saya ini bagian dari *cultural education*, membiasakan membangun kultur pedestrianisasi, kemudian kita buat *shelter*-nya.

Lalu bicara soal angkot. Apabila Bogor dikatakan kota sejuta angkot, itu adalah kebohongan. Angkot di Bogor hanya berjumlah 3.214, tidak sampai satu juta, dan itu kita kurangi. Angkot yang berusia di atas 20 tahun kita *scratch*. Kita konversi dari 3 angkot menjadi 1 bus kecil. Sekarang sudah ada sekitar 47 bus, akhir tahun ini kita tambah lagi 3 koridor, sekarang jadi 6 koridor. Kita targetkan untuk warga Bogor, angkot akan tidak ada lagi dari pusat kota Bogor, di seputar Kebun Raya, di bulan Desember tahun ini. Kemudian akan kita geser ke pinggir kota menjadi *feeder* saja, yang mana sedang kita usahakan untuk jadi bertenaga listrik, dan busnya juga bertahap jadi bus listrik. Kita perlu membangun ekosistem *EV* (*Electric Vehicle*) di Bogor. Bogor adalah salah satu kota pertama yang mengalokasikan anggaran untuk kendaraan listrik, di saat kota-kota lain belum. Saya sudah lebih dari satu tahun memakai kendaraan listrik. Kita bangun 10 titik SPKLU (Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum) di Kota Bogor, yakni di Istana Bogor, Balai Kota, dan Alun-Alun Bogor. Selain itu, komunitas *EV* di Bogor juga mulai berkembang.

Pertanyaan soal minyak jelantah, harus saya akui itu adalah salah satu program yang tidak terlalu maksimal. Bahan bakar bus Trans Pakuan adalah minyak jelantah. Kemarin *supply* minyak jelantah tidak

sustain, kemudian *collector point*-nya bermasalah. Selain itu, ada keberatan dari warga dan busnya tidak *well-maintained*, makanya kita lewati itu. Inovasinya kurang maksimal, maka kita koreksi dan evaluasi.

Saya juga sedang bekerja sama dengan Oppie Andaresta, Nugie, dan lain-lain, untuk mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar dan kita sudah mempunyai alatnya. Saya dihubungi oleh suatu komunitas yang bisa mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar dan alatnya sudah diuji. Akhirnya kita coba di Bogor. Sampah plastik tersebut diolah menjadi bahan bakar dan dimasukkan ke mobil. Mobilnya berhasil jalan sampai Bali. Sekarang alatnya ada di Bogor dan ini ingin kita replikasi. Alat ini juga bisa digunakan untuk acara konser musik, jadi tidak perlu menggunakan bahan bakar solar. Sampah yang dihasilkan oleh pengunjung konser dikumpulkan lalu diolah lagi menjadi listrik.

Akan tetapi perlu pendanaan. Saya tanya, “perlu berapa?”, dijawab “sekian ratus juta,” kita cari. Menjawab pertanyaan tadi, *commitment is number one*. Dari semua penghargaan dan apresiasi, yang pasti dipuji adalah komitmen. Jika komitmen tidak ada, maka aksi itu akan dipertanyakan perihal bergabungnya Kota Bogor mengikatkan diri ke ICLEI dan lembaga-lembaga lain. Kita harus *progressing* agar kita terikat dan dipaksa untuk berkolaborasi dan menjaga konsistensi itu. Komitmen itu juga yang menjadi dasar bagi donor-donor untuk membantu, mulai dari *capacity-building*, pembangunan infrastruktur, dan lain-lain. Semuanya berlandaskan komitmen.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Jadi Pak Bima sudah mempunyai beberapa solusi untuk krisis iklim, dimulai dari hal sederhana seperti membiasakan orang untuk jalan kaki, kemudian biodiesel dari sampah plastik yang diubah menjadi bahan bakar. Kapan biodiesel tersebut akan di-*launch* dan dijual, apakah ada rencana?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Itu persoalannya, kita harus bersaing dengan pemain besar, kita membutuhkan alokasi dan *support* besar. Terkadang, selain membutuhkan komitmen, kita juga membutuhkan nyali karena seperti melawan *mainstream* juga. Saya akui itu tidak mudah.

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Menyambung pertanyaan dari ICLEI tadi, artinya bagaimana sebenarnya untuk memotivasi pemimpin-pemimpin lain yang ingin menindaki isu ini — atau kita sebagai rakyat yang ingin mempunyai pemimpin-pemimpin seperti Pak Bima — apa kira-kira motivasinya untuk membuat mereka juga melakukan hal yang sama terbuka dan mau menerima inovasi?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Harus ada *best practices*, tidak bisa bicara saja. Begitu *best practices*-nya disukai orang, sudah pasti akan ada insentif untuk direplikasi atau diduplikasi. Kita semua *inspire* dari *other mayors* yang juga berhasil. Jadi *best practices* seperti ini harus disebar, diviralkan, dan kemudian akan berpengaruh bagi kebijakan-kebijakan di tempat lain.

Putri, Universitas Wanita Internasional:

Bagaimana kita sebagai pemuda bisa *lobby* dan mendapat audiensi dari pemangku kepentingan dan bisa mengambil perhatian mereka — seperti isu iklim ini — bisa masuk ke dalam program mereka?

Nida, Publik:

Saya baru mendengar tadi akan ada kebijakan di Bogor pada bulan Desember tahun ini bahwa angkot sudah tiada lagi di pusat kota. Bagaimana strateginya untuk *raising awareness* masyarakat untuk transisi transportasi tersebut?

Stafa, Publik:

Bagaimana Bapak melakukan pendidikan iklim untuk anak SD, SMP, dan SMA?

Bima Arya (Wali Kota Bogor), Panelis:

Cara paling efektif agar didengar pemerintah adalah mencari pintu yang tepat untuk mencapai orang nomor satu. Pintu itu bisa macam-macam, bisa dari tangan kanan Wali Kota, istri, anak, sahabat, atau kepala dinas yang paling dekat dengan Wali Kota. Saya mempunyai puluhan tim organik. Secara informal, saya berkata kepada mereka untuk memberi tahu kepada saya hal-hal yang didapatkan dari warga. Untuk yang formal, ada aplikasi pengaduan namanya Si Badra di Bogor. Atau bahkan cara ekstremnya kalian langsung datang saja ke balai kota. Sangat sering ada yang datang, mulai dari yang sopan dan membuat janji, yang norak membuat demo, hingga ada yang menyegel balai kota itu. Tapi saya paham, itu cara kalian untuk menarik perhatian. Buat sesuatu yang *real*. Contohnya, tadi pagi, saya mempunyai agenda dan saya melihat anak-anak LSPR (London School of Public Relations) masuk ke satu kampung di Bogor. Mereka melakukan edukasi pengrajin batik di situ, saya lihat itu keren.

Pertanyaan selanjutnya, semua itu harus ada hitungannya. Ada 3.400 angkot melayani warga, kemana saja rutenya, kalau angkot dihilangkan ibu-ibu nanti naik apa? Baik itu ke pasar, ke pengajian, dan lain-lain. Ketika kita konversi, harus kita hitung juga. Saat kita paksa angkot untuk hilang, apakah busnya cukup? Jika busnya tidak cukup maka *headway*-nya akan lama, orang-orang pun akan kembali ke angkot. Maka itu, strateginya harus pas. Di Bogor, tiga angkot menjadi satu bis, 40 bus menggantikan 150 angkot, itu kita hitung *headway*-nya. Ada beberapa koridor agar orang-orang tidak kembali lagi. Kedua *shelter*-nya juga tidak boleh terlalu jauh, harus cukup, dan ini kita evaluasi terus. Silakan kalau ke Bogor, naik ke stasiun kereta dari situ, nanti lanjut naik bus kita. Di situ akan merasakan mode transportasi Bogor yang baru menggunakan bus kita. Hampir satu tahun gratis, tetapi mulai dari dua minggu lalu sudah berbayar. Lalu kita harus pikirkan juga supir angkotnya ke mana. Dari 3 supir angkot bisa jadi 3 *shift* di satu bus, tapi tidak semua supir-supir itu bisa. Bagaimana jika ada yang sudah berumur 65 tahun? Bagaimana jika ada yang cuma lulusan SMP dan tidak bisa membaca? Tidak bisa. Orang-orang yang tidak *qualified* ini kita pikirkan kemana. Opsinya adalah jadi montir di bengkel bus ini, kita didik bekerja sama dengan UMKM.

Menjadi Wali Kota itu tidak mudah, banyak yang harus dipikirkan, dan juga harus kita pikirkan. Misalnya Pak Dino mempunyai satu angkot, Pak Dino mungkin akan mempunyai lima supir angkot tanpa dia tahu. Katakanlah saya supir angkotnya dan dia berkata, “Bima, pokoknya kamu setor ke saya Rp 20 ribu.” Dari Subuh saya berangkat, jam 10 pagi saya sudah dapat Rp 20 ribu, lalu saya cari Pak Jojo. Sekarang kamu bawa angkotnya setor ke saya Rp 15 ribu, dia bawa jam 1 siang sudah mendapat Rp 15 ribu, dia panggil lagi yang lain. Merupakan tanggung jawab Wali Kota untuk memikirkan supir-supir yang banyak itu.

Di Bogor ada Sekolah Adiwiyata, jadi di Bogor kita lombakan juga. Di sekolah-sekolah hijau, kita masukkan kurikulum, kita ikutkan mereka di lomba kebersihan ‘Bogorku Bersih’, dan yang paling sederhana kita ajarkan mars Kota Bogor.

[Pemutaran video Adipura Kota Bogor]

Dengan cara ini, mudah-mudahan, anak-anak ini akan selalu ingat hari dimana Wali Kota mendekati dia, menyerahkan piala untuk dipegang dengan menyampaikan kata-kata, “jagalah Adipura, tolong jaga Kota Bogor untuk selalu bersih.”

Giorgio Budi Indarto (Yayasan Madani Berkelanjutan), Moderator:

Saya tidak akan menyimpulkan banyak karena saya mendapat inspirasi yang banyak. Saya pikir teman-teman disini kalau mendengarkan cerita Pak Bima Arya pasti juga mendapatkan inspirasi. Artinya, hal-hal kecil seperti Adipura yang hilang lalu direbut kembali, jika dibuat film akan menjadi menarik, jadi biografi Pak Bima Arya dibuat film nanti suatu hari nanti.